

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

**WIDIA WATI
NPM : 1651010383
Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Dan
Bisnis Islam

Oleh:

WIDIA WATI

NPM : 1651010383

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si

Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan kemandirian daerah, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dijadikan andalan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari sektor pariwisata, karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu penerimaan sektor pariwisata yaitu berasal dari jumlah kunjungan wisatawan. Inilah yang nantinya menjadi salah satu penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat secara simultan dan persial. Serta bagaimanakah pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat. Dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata dalam perspektif ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dimana data-data tersebut kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa hasil pengujian secara persial menyatakan bahwa Panjang Jalan dan Jumlah Kunjungan Wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017. Berdasarkan hasil uji simultan Panjang Jalan dan Jumlah Kunjungan Wisatawan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017.

Dalam Islam sumber keuangan pada zaman Rasulullah SAW menurut pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai utusan Allah. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain itu masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan dan ekonomi. Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Infrastruktur Jalan, Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widia Wati
NPM : 1651010383
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM "** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Desember 2020



Widia Wati
NPM. 1651010383



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : **WIDIA WATI**

NPM : **1651010383**

Prodi : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si
NIP. 197602022009122001

Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy
NIP.

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** disusun oleh, **Widia Wati**, NPM: 1651010383, program studi **Ekonomi Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu / 06 Januari 2021**

Tim Penguji

Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Sc

Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt

Penguji II : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirabbil'alamin Teriring doa dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku yang teramat sangat ku cinta Bapak SUTARDI dan Ibu SUHARTI yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, moral maupun materi serta waktu yang tiada henti demi mewujudkan keberhasilanku.
2. Kakak ku Diki Chandra dan Adik ku Rani Julia yang teramat sangat ku sayangi, yang selalu memberikan dukungan semangat, mendoakan, menasehati, dan mendukungku.
3. Kepada Dedi Prayoga yang tiada henti mengingatkan dan menyemangati untuk segera menyelesaikan tugas akhirku.
4. Kepada Apifah Urpiah yang tidak pernah lelah menemaniku, kemanapun, dan kapanpun dalam setiap proses perjalanan penulisan skripsi ini
5. Teman-temanku kelas ekonomi E yang sudah menjadi keluarga ke duaku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

RIWAYAT HIDUP

Widia Wati, dilahirkan di Pura Mekar, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11 Oktober 1997. Yang merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak Sutardi dan Ibu Suharti. Penulis memiliki dua saudara kandung, kakaku Diki Chandra dan adikku Rani Julia.

Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Pendidikan dimulai pada Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan tahun 2004-2010.
2. Selanjutnya meneruskan pendidikan di sekolah menengah pertama pada SMP Negeri 01 way tenong pada tahun 2010-2013.
3. Selanjutnya meneruskan pendidikan di sekolah menengah kejuaruan pada SMK N 01 Way Tenong pada tahun 2013-2016.
4. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam dalam jurusan ekonomi syariah yang di mulai pada tahun akademik 2016.

KATA PENGANTAR *Bismillahirrahmanirahim*

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabaraakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabiin dan tabiatnya serta para pengikutnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Evi Ekawati, S.E.,M.Si dan Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.,M. E.Sy. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 01 Februari 2021

Penulis,

WIDIA WATI

NPM. 1651010383

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Batasan Masalah	15
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI / KAJIAN PUSTAKA	

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2. Konsep dan Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
a. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
B. Pembangunan	
1. Teori Pembangunan Dalam Ekonomi Islam	27
C. Infrastruktur	
1. Infrastruktur Dalam Ekonomi Islam	31
2. Teori Pembangunan Infrastruktur	31
3. Jenis-Jenis Infrastruktur	32
D. Teori Pariwisata	
1. Pengertian Pariwisata	38
2. Jenis-Jenis Pariwisata	40
3. Pariwisata Menurut Ekonomi Islam	44
E. Kerangka Pemikiran	46
F. Hipotesis Penelitian	47

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Metode Penelitian	51
1. Jenis Penelitian	51
2. Sifat Penelitian	51
B. Data dan Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	

1. Kepustakaan.....	52
2. Penelitian Lapangan.....	52
D. Populasi dan sampel	
1. Populasi	53
2. Sampel	53
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	54
F. Metode Analisis Data	54

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat	
a. Letak Geografis Kabupaten Lampung Barat	60
b. Topografi Kabupaten Lampung Barat	61
2. Hasil Penelitian	
a. Panjang Jalan	62
b. Jumlah Kunjungan Wisatawan	63
c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64

B. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas	65
b. Uji Multikolinearitas.....	66
c. Uji Autokolerasi	67
d. Uji Heteroskedastisitas	67
2. Uji Regresi Linear berganda	68

3. Uji Hipotesis	
a. Uji T (Persial)	70
b. Uji F (Simultan)	71
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72
C. Pembahasan Hasil Analisis Data	
1. Pengaruh Infrastruktur Jalan (Panjang Jalan) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	73
2. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	74
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung	
Barat Tahun 20014-2-17 (dalam jumlah rupiah)	10
1.2 Panjang jalan Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017	11
1.3 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan	
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017	13
2.1 Panjang jalan kabupaten lampung barat tahun 2014-2017	59
2.2 Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten lampung barat	
tahun 2014-2017	61
2.3 Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten lampung barat	
tahun 2014-2017	62
2.4 Hasil Uji Normalitas	64
2.5 Hasil Uji Multikolinearitas	64
2.6 Hasil Uji Autokolerasi	65
2.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
2.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
2.9 Hasil Uji T	69
2.10 Hasil Uji F	70
2.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	46

LAMPIRAN

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinearitas
3. Uji Autokolerasi
4. Uji Heteroskedastisitas
5. Data Excel
6. Analisis Regresi Berganda
7. Uji T Persial
8. Uji F Simultan
9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, penulis akan menguraikan artian istilah–istilah atau kata–kata yang ada dalam judul skripsi terlebih dahulu.

Tujuan dari penegasan judul skripsi ini yaitu agar tidak terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam memaknai dan memahami arti setiap kata yang ada dalam judul skripsi ini.

Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi di perlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini ialah **“PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Untuk itu penulis akan menegaskan arti kata yang digunakan dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.¹

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses pada tgl 22 januari 2020. Pukul.14:13

2. Pembangunan

Pembanguna atau *development* adalah proses perubahan yang mencakup seluruh dari sistem sosial, misalnya politik, ekonomi pertahanan, infrastruktur, pendidikan dan juga teknologi, kelembagaan, dan juga kebudayaan.²

3. Infastruktur

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi *Oxford Dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.³

4. Jalan

Jalan merupakan penghubung dari satu titik ke titik lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari satu kota ke kota yang lain.⁴

5. Sektor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor adalah lingkungan suatu usaha (pertanian, perindustrian).⁵

6. Pariwisata

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti seluruh,

² Todara, M dan Smith, S. *Pembangunan Ekonomi edisi 9*, (Jakarta : Penerbit Erlangga. 2011) Hlm. 19

³ Ir. Sulistijo Sidarto Ulyo, M.T dan Budi Santoso, *proyek infrastruktur & sengketa kontruksi*, (Cimanggis Depok : PRENADAMEDIA GRUP, 2018) Hlm. 01

⁴Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, (Malang : POLINEMA PRESS, 2018) Hlm. 91

⁵Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses pada tgl 22 januari 2020. Pukul. 15:02

semua, dan penuh. Wisata berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat satu tempat, menuju dan singgah di suatu atau beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal atau semula.⁶

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami dan disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi.⁷

Berdasarkan penegasan dari istilah-istilah atau kata-kata diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam proposal skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata terhadap peningkatan

⁶Shofwan hanif dan dian pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2018) Hlm. 01

⁷ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. (Jakarta : RAJAWALI PERS. 2008) Hlm. 17

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini baik alasan secara objektif maupun subjektif adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Setiap pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting baik di negara maupun daerah. Selain sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata dapat membantu mengatasi masalah untuk mengurangi angka pengangguran. Sektor pariwisata terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti objek wisata, transportasi, telekomunikasi, industri cinderamata, dan fasilitas lainnya serta dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas dan dunia usaha. Pembangunan infrastruktur berperan sebagai penunjang pengembangan pariwisata. Akan tetapi pembangunan infrastruktur yang belum merata di setiap daerah wisata menjadi alasan mengapa wisata tersebut tidak berkembang dengan baik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

2. Alasan Subjektif

Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.

C. Latar Belakang

Negara merupakan lembaga (organisasi) kemasyarakatan dengan wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dengan didukung oleh warganya guna mencapai tujuan tertentu (Sekreteriat Jenral BPK, 1998:7). Salah satu kebijakan yang cukup penting dan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah membuat RAPBN dan menetapkan sebagai APBN, dimana APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR (UU No.33 tahun 2004).

Pemerintah Negara memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan, pertahanan dan keamanan, keadilan, pekerjaan umum, perekonomian dan sebagainya untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warganya, begitu juga dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah provinsi untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam penerimaan pemerintah Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.⁸ Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan mereka untuk meningkatkan PAD mereka yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah.

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.⁹

⁸ Abdul Halim dan Gozalli ar rozzaq, *kontribusi dan efektifitas retribusi jasa umum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, Surakarta. USM, 2009, Hlm. 76

⁹ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2004), Hlm. 81

Penyelenggaraan otonomi daerah berawal dari pergantian pemerintah Orde Baru menuju pemerintah Orde Reformasi, dan kemudian menjadi Orde Otonomi Daerah. Pada zaman Orde Baru, pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan kreativitas daerah, karena kurangnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri, tidak disertai dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, dan pembiayaan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga malah terjadi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Pemerintah (baik itu pusat maupun daerah) berusaha memperoleh penerimaan/pendapatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang sangat penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya

peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik, salah satunya dengan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berbicara masalah PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana itu sendiri maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Perkembangan pembangunan daerah menghendaki juga perkembangan di sektor pendapatan daerah ini, yang minimal harus dapat mengimbangi langkah-langkah pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan terutama dalam mempersiapkan kerangka tinggal landas, sehingga bersama-sama dengan daerah lain berkembang ke arah yang di inginkan, untuk secara nasional berada pada landasan pacu yang sama dalam era lepas landas.

Bahwa kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya

pemberdayagunaan aparatur, termasuk di dalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah.¹⁰

Secara administrasi pengelolaan PAD belum dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasinya.¹¹ Selain itu hambatan dalam mengelola PAD kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparatur, lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi.

Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan untuk pemerintah daerah atau kota agar mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Berikut ini disajikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Lampung Barat selama periode 2014-2017 :

¹⁰ Ibid, Hlm. 82

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 121

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017
(dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	2014	40.800.358.949,56
2.	2015	46.434.649.521,12
3.	2016	49.078.910.603,87
4.	2017	82.161.639.609,18

Sumber : Dinas Keuangan Kabupaten Lampung Barat 2020 (data diolah).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata. Keterkaitan pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak.

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini karena infrastruktur sendiri merupakan persyaratan bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.¹² Infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan pemukiman, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor ekonomi seperti

¹²Farah Salsabila Muchtar, Atih Rochaeti, Aan Julia, “ *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat Periode 2010-2015*”, Prosiding Ilmu Ekonomi, Volume 3, No. 1 (Tahun 2017), Hlm. 28

perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur juga berperan dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya. Sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas serta mempercepat pembangunan nasional. Berikut disajikan data Panjang Jalan Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017.

Tabel 1.2

Panjang Jalan Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017

No.	Tahun	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1.	2014	273,21	89,48	137,8	485,28	985,77
2.	2015	302,12	97,95	121,48	464,19	985,74
3.	2016	363,17	72,77	95,95	455,89	987,78
4.	2017	317,58	53,14	87,35	265,93	724,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 2020 (data di olah).

Seperti dalam Al-quran pada 1400 tahun yang lalu telah menyerukan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam dan juga seruan untuk tidak berbuat kerusakan, pada surah Al-Baqarah ayat 60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَإِنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan

dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Baqarah : 60)

Selain pembangunan infrastruktur yang berjalan dengan baik, sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini sektor pariwisata menyumbang penerimaan kepada daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Pendapatan Asli Daerah Merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapayan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.¹³

Dari sektor pariwisata, Kabupaten Lampung Barat memiliki berbagai potensi objek wisata alam, wisata budaya, serta wisata bahari dan pantai. Sebut saja misalnya Danau Ranau di Sukau, Air terjun kubu perahu di Balik Bukit, dan Pantai Labuhan Jukung di Krui adalah objek-objek wisata yang menarik. Dari segi aset wisata, Lampung Barat memang kaya akan objek wisata. Kini tinggal bagaimana pengelolaan dan pengembangannya. Pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan bisa menjadi jawaban bagi pembangunan

¹³Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : PT Grafindo, 2010), Hlm. 54 Persada

pariwisata di Lampung Barat. Berikut disajikan data peningkatan atau perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017.¹⁴

Tabel 1.3

**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2014 -2017**

No	Tahun	Wisatawan		Jumlah
		Nusantara	Mancanegara	
1.	2014	13.735	421	14.156
2.	2015	13.825	421	14.246
3.	2016	14.567	396	14.963
4	2017	15.918	531	16.449

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Juli 2018 (data diolah).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 16.449 wisatawan.

Adanya pertumbuhan/perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Lampung Barat tentunya dapat mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Lampung Barat dalam sektor pariwisata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya akan memberikan keuntungan kepada pertumbuhan devisa negara dan retribusi pariwisata di Kabupaten Lampung Barat baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak dapat dipungkiri, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya memberikan

¹⁴Disbudpar Kabupaten Lampung Barat 2018

penambahan penerimaan PAD tetapi juga memberikan peningkatan pada sektor perekonomian terkhusus pada usaha-usaha lokal masyarakat sekitarnya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pola pelayanan dan menjaga kelestarian tempat wisata tetap terjaga dengan disertai pengelolaan lokasi wisatawan dengan baik. Selain itu, melengkapi fasilitas sekitar tempat pariwisata akan ikut memberikan pengaruh yang signifikan kepada pertumbuhan/perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Menurut pandangan islam, basis dan tujuan utama syariat islam adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Apapun yang menjamin terlindungnya kelima permasalahan ini akan memenuhi kepentingan umum, kemashlahatan, yang terletak pada keadilan yang sempurna dan kebijaksanaan.

Islam rumah tangga daerah dianalogikan sebagai rumah tangga keluarga dimana harus adanya kegiatan ekonomi yang mendatangkan financial untuk mencukupi dan melanjutkan keberlangsungan hidup, dalam Islam sumber pendapatan dalam suatu rumah tangga hendaknya dari sesuatu yang baik dan dianjurkan sesuai dengan yang telah di syariatkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bersumber dari segala sektor dan potensi yang dapat digali terkecuali segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.¹⁵

¹⁵Rini Haryati, *Analisis Sektor Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2018, Hlm. 15

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

D. Batasan Masalah

Penulis melakukan batasan masalah ini yaitu agar penulis dapat lebih fokus terhadap ruang lingkup penelitian yang akan di bahas agar tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata sebagai variabel X (independen) dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel Y (dependen).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat?
2. Apakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat ?
3. Bagaimanakah pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif ekonomi Islam ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.
3. Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pariwisata dalam perspektif ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi/pemikiran dalam memilih objek penelitian agar dapat bermanfaat bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan seabagi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah sistematis, dan dapat menulis karya ilmiah sesuai dengan teori ekonomi Islam.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dikelola oleh Negara yang sumbernya dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk mensejahterakan.¹⁶

Sesuai dengan hak dan kewajiban daerah yang diberikan oleh UU RI No. 23 tentang pemerintah daerah yang telah memperbolehkan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah sendiri, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lainnya yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa : hak dan kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud diatas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang di maksud adalah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 UU RI

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung : Deponegoro, 2008. H. 187

No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa PAD yaitu¹⁷ :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor. Yang dimaksud tentang peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang dikenakan pajak pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut¹⁸:

1. Intensifikasi, melalui upaya ;
2. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (eksentifikasi)
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber keuangan pada zaman Rasulullah Saw menurut pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad Saw diutus sebagai seorang

¹⁷ Khairul Muluk, *Peta Konsep, Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah*, Surabaya, ITS Press, 2009

¹⁸ Abdullah. *Pajak Dan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia H.121

rasul (utusan Allah). Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain itu masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi. Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi tersebut ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a”laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al khaas li daf’I dlararin „aam” menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait alMaal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-

orang kaya¹⁹. Sudah diketahui bawa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah ta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an AlHujurat (49):15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya :*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”*.²⁰

Allah berfirman dalam Al-Qur'an At-taubah ayat : 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:”Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

¹⁹ Masdar F, Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993, H. 13

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, H. 190

Pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari²¹ :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2. Konsep Dan Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

a. Konsep pendapatan asli daerah

Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu asset dan meningkatnya nilai net asset yang menjadi partisipasi hak.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 34

²¹ Maribot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, H. 29

Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi :

- a. Pajak provinsi terdiri dari : (i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Di Atas Air, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK) dan kendaraan diatas air, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perumahan (P3ABTAP).
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (xi) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, (xi) Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah.
- c. Retribusi dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam prinsip akuntansi syariah yang perlu diuji kebenarannya yang dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran laporan. Kebenaran ini akan menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi didalam pencatatan Retribusi serta Pendapatan Asli Daerah.²²

²² Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016. H. 15

Maka kebenarannya dijelaskan sebagaimana dalam QS al- baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ كُمْ
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۲۸۲

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Akuntansi syariah memiliki tujuan pokok yaitu : 1) pertanggung jawaban (accountability and stewardship), memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, bentuk dan waktu yang tepat, berguna bagi pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan operasi suatu unit. 2) managerial, menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja organisasi, dan. 3) pengawasan terselenggaranya pemeriksaan atau pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.²³

b. Dasar hukum pendapatan asli daerah

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah.

²³ Mhd, Syahman Sitompul, *Akuntansi Masjid*, Medan : Febi UIN-SU Press, 2015. H. 8

B. Pembangunan

1. Teori Pembangunan Dalam Ekonomi Islam

Secara Bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun, bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki, membuat supaya maju dan berkembang.

Secara epistimologi pembangunan dalam perspektif Islam yaitu peningkatan kesadaran insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikut urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. Pembangunan ini dapat diukur dengan empat hal utama yaitu kebebasan, keadilan, akhlak dan moral, dan kebahagiaan. Sekalipun menurut Muhammad Ayukri Salleh pembangunan konvensional dan pembangunan yang berdasarkan islam keduanya mengakui adanya perbedaan dikalangan masyarakat dalam berbagai bidang dan juga menganjurkan agar keadilan dilaksanakan di tengah-tengah perbedaan tersebut. Namun, yang membedakan pembangunan konvensional dan pembangunan Islam adalah konsep perbedaan harta benda dan konsep keadilan. Konsep perbedaan harta benda menurut ekonomi liberal disebabkan adanya penindasan dan eksploitasi manusia yang lebih berkemampuan, lebih berpeluang, atau lebih berkuasa. Sedangkan dalam Islam perbedaan itu telah Allah SWT jelaskan dalam firmanNya dalam surah Al-an'am ayat 165 bertujuan

sebagai alat Allah SWT menguji manusia dan alat manusia untuk mensyukuri nikmatnya.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya; *"Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Begitu hal nya konsep keadilan, mengikut falsafah pembangunan konvensional keadilan lebih berdasarkan pada nilai-nilai materialisme secara kuantitas. Sedangkan Islam melihat keadilan apabila manusia dapat mempertahankan rahmat kepada sekalian alam tanpa durhaka kepada Allah SWT. Sesuai dengan pendapat Umar Chapra bahwa masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan harta benda dengan tidak melihat pada aspek moral, maka pembangunan material tidak akan mencapai sebuah keadilan tanpa mendapat dukungan akhlak dan moral. Hal itu karena pembangunan yang adil memerlukan penggunaan semua sumber dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga kedua-duanya mustahil dapat tercapai melainkan diiringi dengan moral dan akhlak dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal itu karena, aktivitas ekonomi manusia tidak hanya

ditujukan sebagai pemuasan keperluan fisik saja, akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada sang pencipta. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak dapat dicapai, kecuali jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kaffah. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan kekal, kebaikan yang selaras dengan kaedah-kaedah agama Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas saja,²⁴

Allah SWT tidak menciptakan alam dan isinya melainkan untuk makhluknya, dengan tujuan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan cara menjaga dan memanfaatkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-hajj: 65

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ فُ
لَرَّءُ وَرَحِيمٌ

Artinya : *“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya*

²⁴ Syamsuri, “Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7 No. 2 (Juli-Desember, 2016). H. 224-226

Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofi, yaitu *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyyah*, *khalifah*, *tazkiyah an-nas*, dan *al-falah*. Kelima pondasi filosofi tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama Islam, yaitu al-quran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan, dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal ini yang menjadi fokus utama bagi upaya pembangunan dan jantung bagi proses pembangunan adalah manusia. Proses pembangunan apapun harus dimulai dari pembangunan moral, spiritual, fisik, dan pembangunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen bagi lingkungan fisik dan sosia-ekonomi. Manusia adalah agen perubahan yang aktif dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan struktural, atau pencapaian keseimbangan ekologis. Semuanya itu hanyalah alat atau syarat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut dalam pencariannya atas martabat manusia, mungkin saja telah hilang tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penurunan

moral yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dimasa akan datang.

C. Infrastruktur

1. Infrastruktur dalam ekonomi islam

Urgensi jalan adalah disebabkan posisinya sebagai sarana yang memudahkan mobilisasi dan peredaran unsur-unsur produksi, dan sebagai sarana yang menghubungkan antara pasar, dan menjadi tempat peredaran hasil produksi. Ummar bin Al Khathab sangat memperhatikan keurgensian jalan, baik jalan darat maupun jalan air, dimana ummar menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Sebagaimana umar juga mensyaratkan kepada ahli dzimmah agar andil dalam perbaikan jalan dan pembanguna jembatan.²⁵

2. Teori Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, effendi (2002) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi, bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi serta agar para investor mau menambahkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal

²⁵ Jaribah Bin Ahamd Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), H. 514

menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Secara spesifik oleh store (dalam kodoatie 2005), infrastruktur di definisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²⁶

3. Jenis-Jenis Infrastruktur

1. Infrastruktur transportasi

Transfortasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan sarana dan prasarana transportasi tidak dapat terpisahkan

²⁶ Budi Setiawan, Ahmad Farhani, “Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol. 3, No. 2, September 2019

dalam suatu program pembangunan. Kelangsungan proses produksi yang efisien, investasi dan perkembangan teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik. Transportasi faktor yang sangat penting strategi untuk dikembangkan, diantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lainya dan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia²⁷.

Hurs (1974) mengemukakan bahwa interaksi antara wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antara wilayah dan sangat penting perannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi di kembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi anatara penduduk lokal dengan dunia luar.

²⁷ Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015, H. 1-2.

Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini dijabatani melalui proses penggudangan, dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.

2. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrasytuktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang, dan informasi dari satu zona pasar lainnya, kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar, dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralsisir harga-haraga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampung - kampung).²⁸

Jalan berperan penting dalam merangsang maupun mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Karena itu, setiap negara

²⁸ Mesak Lek, "Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Di Distrik Ayamaru, Aitinyo Dan Aifat)", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vo. 6 No.1 Februari, 2013, H.32

melakukan investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. Sekitar 0.8% dari PDB negara berkembang dikeluarkan untuk pembangunan, pengembangan jalur, dan rehabilitasi jalan (*fay*, 1999,13). Sistem Jalan yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produknya, mengembangkan industri, mendistribusikan populasi serta meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, prasarana yang minim dan buruk kondisinya menjadi hambatan dalam mengembangkan perekonomian. Keterbatasan jaringan jalan dapat menghambat pertumbuhan suatu wilayah sehingga aktivitas perekonomian dapat terganggu yang pada akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya harga suatu barang.²⁹

3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi

Sumber daya adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.³⁰

Irigasi adalah upaya penyediaan, pengaturan, dan pembangunan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan

²⁹ Enik Widayati, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktifitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008, *Media Ekonomi*, Vol.18 No.1, April 2010, H. 45-46

³⁰ N.N, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 Ayat 1&7.

irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.³¹

4. Infrastruktur air minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.³² Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.³³

5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat

Sistem sanitasi terpusat (*off site sanitation*) merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah

³¹ N.N, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Pasal 1 Ayat 3,4,5.

³² N.N, Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan System Penyediaan Air Minum, Pasal 1 Ayat 2.

³³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 5,6,8.

kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengelolaan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan.

Proses pengelolaan air limbah sistem terpusat umumnya dibagi menjadi empat tahapan, yaitu : pengelolaan awal (*pre treatment*), pengelolaan tahap pertama (*primary treatment*), pengelolaan tahap kedua (*secondary treatment*), pengelolaan tahap akhir (*tertiary treatment*).³⁴

6. Intrastruktur telekomunikasi dan informatika

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, internet dan atau penyebaran informasi.³⁵

7. Infrastuktur ketenagalistrikan

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan,

³⁴ Puji Retno Wulandari, "Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Studi Kasus Di Perumahan Pt. Pertamina Unit Pelayanan Lii Plaju-Sumatera Selatan)", *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, Vol. 2, No. 3(September 2014), H. 501

³⁵ Ikhsandri, reini s. ilmiaty dan nyimas septi r. p, "kajian infrastruktur pengelolaan sampah di kawasan berkembang jakabaring kelurahan 15 ulu kota Palembang", *jurnal teknik sipil dan lingkungan*, vol. 2, no. 1, (maret 2014), h. 138-139

dalam rangka penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.

8. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk barubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, anantara lain panas bumi, angina, bioenergi, sinar matahari, aliran dan air terjun, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.³⁶

³⁶ Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "Program Strategis Ebtke Dan Ketenagalistrikan", *Jurnal Energi Media Komunikasi Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, Edisi 02 (2016), H. 16

D. Teori Pariwisata

1. Pengertian pariwisata

Menurut uu No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Soekadijo, pariwisata secara singkat dapat di rumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.³⁷ Pariwisata merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.³⁸

Sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, kepariwisataan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata. Kepariwisataan ialah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan penguasa berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata ini hendaknya di dasarkan pada

³⁷ Karyono Dan Hari, *Kepariwisataan*, Jakarta : PT Grasindo, 2011, H. 16

³⁸ Pendit, Nyoman S, *Ilmu Pariwisata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990, H. 10

norma-norma agama, kelestarian sumber daya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.³⁹

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata adalah kumpulan dari usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyelenggaraan pariwisata, industri pariwisata adalah salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bias dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis pemerintah, tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata.

2. Jenis-Jenis Pariwisata

Jenis-jenis wisata yang ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, pariwisata dapat juga dibedakan dengan adanya beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

a. Wisata budaya

Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka,

³⁹ Suwardjoko P. Warpani Dan Indira P. Warpai, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, Bandung : ITB, H. 7

⁴⁰ Aisyah Oktariani, *Pengaruh Tingkat Hunia Hotel Dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung, 2012. H. 36

cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti eksposisi seni (seni tari, drama, musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif sejarah dan sebagainya.

b. Wisata Maritim Atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, seperti di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah maritim, dan jenis ini disebut juga dengan wisata tirta.

c. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Wisata jenis ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengantar wisatawan ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pencinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan dan lain sebagainya yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini pula banyak dikaitkan dengan kegemaran akan

keindahan alam, kesegaran udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang dan margasatwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.

d. Wisata konvensi

Wisata konvensi bisa juga dibilang wisata jenis politik, berbagai Negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan untuk tempat bersidang bagi para peserta suatu konverensi, musyawarah, konvensi, atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Contohnya seperti yang ada di Jakarta yang mempunyai salah satu contoh wisata konvensi yakni balai sidang senayan. Di kabupaten lampung barat sendiri salah satu contoh wisata konvensi yang sedang di kembangkan adalah pariwisata.

e. Wisata pertanian (Agrowisata)

Sama seperti halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, pembibitan dan sebagainya. Dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan subur nya pembibitan berbagai jenis sayur-sayuran dan palawija di sekitar perkebunan yang di kunjungi. Contohnya seperti wisata pertania yang ada di kabupaten Lampung Barat.

f. Wisata buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan di galakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara yang bersangkutan, contohnya seperti di Indonesia pemerintah membuka wisata buru untuk daerah baluran di Jawa Timur dimana wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan.

g. Wisata Kesehatan

Yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.

h. Wisata Olahraga

Yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara.

i. Wisata Komersial

Yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya.

j. Wisata Industri

Yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian⁴¹.

3. Pariwisata menurut ekonomi Islam

Pariwisata dalam Islam merupakan safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.

Pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam sebagai agama universal, yaitu ketika dikenal konsep ziarah, yang secara harfiah artinya berkunjung. selanjutnya lahir konsep dhi"yah, yaitu tata krama berkunjung yang mengatur etika dan tata krama serta hukum hubungan sosial antara tamu (dhaif) dengan tuan rumah (mudhif). Konsep ziarah tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya. ziarah yang dapat diartikan sebagai pariwisata dalam Islam,

⁴¹ *Ibid*, h. 4

mengenal juga berbagai terminologi seperti, assafar, arrihlah, intisyar dan istilah-istilah lain yang seakar dengannya. istilah safar dijumpai antara lain dalam Q.S.Al- Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”

Dalam pariwisata Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh atau tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar ma'ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Tujuan dari ekonomi islam ialah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah pemasukan negara, syar'i terkait kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta. Dan tujuan utamanya

adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari tujuan diatas, maka perkembangan pariwisata dalam islam haruslah sejalan dan sesuai dengan syariat islam yang dapat membuat semua golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.⁴²

E. Kerangka Pemikiran

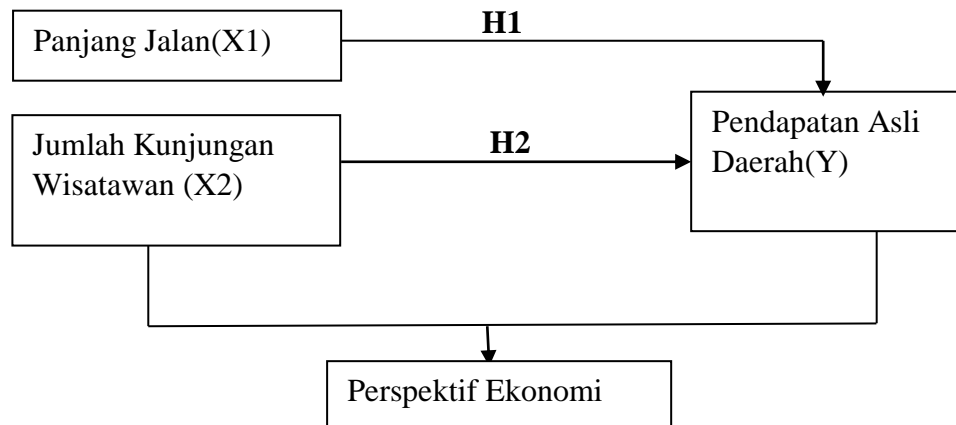
Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah antara lain variabel infrastruktur jalan dan sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak dari pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini karena infrastruktur sendiri merupakan persyaratan bagi sekor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan sektor pariwisata terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti objek wisata, transportasi, telekomunikasi, industri cindra mata, dan fasilitas lainnya serta dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas dan dunia usaha.

Dengan demikian kerangka pikir dari penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁴² M Hanbali, *Tujuan Ekonomi Islam*, Dialetika, 2013

KERANGKA PEMIKIRAN



F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴³ Maka hipotesis dalam penelitian ini skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan (Panjang Jalan) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian suatu wilayah. Hal ini karena infrastruktur sendiri merupakan persyaratan bagi sektor lain untuk berkembang dan juga

⁴³Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung : ALFABETA CV, 2012) Hlm. 93

sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husriatun Putri bahwa infrastruktur jalan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten\Kota 2011-2015.⁴⁴

Rr. lulus prapati NSS, Edy Suryawardana, dan Dian Triyani dalam judul “Analisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di kota semarang. Dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di kota semarang.”⁴⁵

Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

H1 = Pembangunan infrastruktur jalan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.

2. Pengaruh Sektor Pariwisata (jumlah kunjungan wisatawan) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat

⁴⁴ Ibid. Jurnal vol. 5 no. 2 2019

⁴⁵Rr. Lulus prapati NSS, Edy Suryawardana, dan Dian Triyani, “analisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di kota semarang”

Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara di kabupaten lampung barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.⁴⁶

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fiqih Umi Zaliah, bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan secara parsial.⁴⁷

Husriatun Putri, dalam judul “ Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor infrastruktur, sektor pertanian, sektor pariwisata, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015. Dengan metode penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dengan *time series*. Hasil dari penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut Kabupaten/Kota periode 2011-2015, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pariwisata dan sektor infrastruktur jalan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut kabupaten/kota periode 2011-2015.”⁴⁸

⁴⁶Media Lampung.co.id

⁴⁷Fiqih Umi Zakiah, *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010 – 2017*, (Sekripsi, 2019), Hlm. 58

⁴⁸ Husriatun Putri, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 – 2015”, Volume 5 No. 2. 2019

Rini haryati, dalam judul “analisis sektor pertanian dan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2010-2017. Dengan metode penelitian lapangan (*field ressearch*). Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh adanya pengaruh sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat, terdapat pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat. Perspektif ekonomi islam mengenai sektor pertanian dan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena didasarkan untuk masalah.⁴⁹

Melihat penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis ke empat dalam penelitian ini adalah :

H2 = Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.

⁴⁹Ibid, Hlm. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah dan pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan yang sebenarnya⁵⁰. Dalam penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Makasudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data-data di lapangan⁵¹.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,

⁵⁰ Kartini Kertono, *Pengantar Metodologi Riset & Sosial*, Maju Mundur, Bandung : 1996, H. 46

⁵¹ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), H. 46

analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵²

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Dimana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen⁵³. Data yang digunakan adalah data *time series* selama periode 2014-2017, yang di deroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Kepustakaan ialah studi yang digunakan sebagai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini di peroleh dari buku, literatur, jurnal, maupun hasil dari penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan guna memperoleh data-data mengenai masalah yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, (Bandung, ALVABETA, 2018), Hlm. 08

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : ALVABETA, 2012), Hlm. 13

dengan teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti terkait dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat khususnya pada pekerjaan umum dan sektor pariwisata.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.⁵⁴ Populasi dalam peneltian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yang diperoleh dari dinas Pekerjaan Umum dan olahraga, Dinas pariwisata, dan Dinas keuangan daerah yaitu panjang jalan, jumlah kunjunagn wisatawan, dan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Sampel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁵ Dimana bagian dari populasi tersebut yang peneliti gunakan yaitu panjang jalan, jumlah kunjungan wisatawan, dan pendapatan asli daerah (PAD). Yang mengambil sampel selama empat tahun terakhir yaitu 2014-2017.

⁵⁴ Ibid, Hlm. 80

⁵⁵ Ibid, Hlm. 81

E. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis :

a. Variabel dependen

Variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dari sumber ekonomi asli Kabupaten Lampung Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2017.

b. Variabel independen

Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yang diambil yaitu panjang jalan (keseluruhan panjang jalan di lihat mulai dari jalan kondisi baik, jalan kondisi sedang, jalan kondisi rusak ringan, dan jalan konidisi rusak berat), dan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014-2017.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Ada beberapa pendekatan atau metode yang digunakan, antara lain :

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, yaitu untuk mendapatkan nilai penaksir yang tidak bias dan efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda dengan metode OLS (*ordinary least square*), maka sebelum dilakukan analisis hasil estimasi haruslah memenuhi syarat-syarat asumsi klasik :

- a. **Uji Normalitas**, digunakan untuk pengujian apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Residual merupakan nilai sisa atau selisih antara nilai variabel dependen y dengan variabel dependen hasil analisis regresi y . Model regresi yang baik adalah yang memiliki data residual yang terdistribusi normal. Dua cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu dengan analisis grafik (normal p-p plot) regresi dengan uji one sample Kolmogorov-smirnov.⁵⁶
- b. **Uji Multikolinearitas**, yaitu keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen dalam fungsi linear. Dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.⁵⁷

⁵⁶ Ekonometrika Teori Dan Terapan, H. 30

⁵⁷ Ibid. hlm. 34

- c. **Uji Heteroskedasitas**, yaitu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan variansi residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi masalah heteroskedasitas.⁵⁸
- d. **Uji Autokorelasi** yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data *time series*) atau menurut urutan ruang (seperti data *cross section*). Autokorelasi dapat dilihat dengan membandingkan nilai Durbin-Watson dengan batasan signifikansi, jumlah sampel dan jumlah variabel bebas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independent (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependent (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independent dengan variabel dependent apakah masing-masing variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent apabila nilai dari variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

⁵⁸ Ibid, hlm. 41

Keterangan :

Y= Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah)

a= Konstan

X= Variabel Bebas (X1= Panjang Jalan, X2= Jumlah Kunjungan Wisatawan)

e= error⁵⁹

3. Uji Hipotesis

a. Uji T (Persial)

Uji T digunakan untuk menguji koefisien korelasi secara persial, yaitu mengukur variabel bebas dan terhadap variabel terikat secara masing-masing rumus yang digunakan untuk melakukan uji T adalah sebagai berikut ⁶⁰:

$$T = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

T = Signifikan koefisien korelasi ganda

r = Koefisien determinasi

n = Sampel

Uji T/persial memiliki kriteria, apabila t hitung > t tabel maka H₀ ditolak begitu sebaliknya H₀ diterima. Dengan rumus dk= n-2 dan α 0,05. Dengan nilai signifikasi > 0,05 maka H₀ ditolak dan begitu sebaliknya H₀ diterima. Yang berarti

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, Bandung:IKAPI, 2016, H. 104

⁶⁰ *Ibid*, h. 230

menunjukkan bahwa hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan.

b. Uji F (Simultan)

Uji F/Simultan digunakan untuk mengetahui nilai regresi dari variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama.

Rumus uji F sebagai berikut⁶¹ :

$$F = \frac{R^2 (n - m - 1)}{m (-R^2)}$$

Keterangan :

F = Signifikan koefisien korelasi ganda

R = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

m = jumlah variabel bebas

Uji F memiliki kriteria pengujian, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan jika sebaliknya H_0 diterima, dengan dk = n-2 dan nilai signifikansi 0,05 apabila sig < 0,05 maka H_0 ditolak, begitu juga sebaliknya H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada model regresi linear beganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama

⁶¹ *Ibid*, hlm. 286

terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2) semakin mendekati 0 maka semakin lemah variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.⁶²

⁶² Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : Tarsito, 2009), Hlm. 373

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2004.
- Abdullah, *Pajak Dan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Abdul Halim Dan Gozali Arrozzaq, “*Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*”, Surakarta, USM, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.
- Aisyah Oktanani, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung, 2012, H. 36
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Budi Setiawan, Ahmad Farhani, “*Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol. 3, No.2, September 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008.

Ekonometrika, *Teori Dan Terapan*, Hlm. 34.

Enik Widayati, *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktifitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008*, Media Ekonomi, Vol. 18 No. 1 April 2010.

Farah Salsabila Muchtar, Atih Rochaeti, Aan Julia, “*Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat Periode 2010-2015*”, Prosiding Ilmu Ekonomi, Volume 3, No. 1 Tahun 2017.

Fiqih Umi Zakiah, “*Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010 – 2017*”, (Skripsi, 2019).

Husriatun Putri, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata Dan Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015*”, Volume 5 No. 2. 2019.

Ikhsandri, Reini S, Ilmiaty, Dan Nyimas Septi R.P, “*Kajian Infrastruktur Pengelolaan Sampah Dikawasan Berkembang Jakabraing Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang*”, Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan, Vol. 2, No.1, Maret 2014.

Jariban Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc* Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kmus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Diakses Pada 22 Januari 2020, Pukul. 14:13.

Karyono Dan Hari, *Kepariwisataan*, Jakarta : PT Grasindo, 2011.

Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, “*Program Strategis Ebtke Dan Ketenagalistrikan*”, Jurnal Energi Media Komunikasi Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Edisi 02, 2016.

Khairul Muluk, *Peta Konsep, Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah*, Surabaya: ITS Pess, 2009.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.

Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

Mesak Lek, “*Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Di Distrik Ayamaru, Aitinyo Dan Aifat)*”, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 6, No. 1 Februari 2013.

M Hanbali, *Tujuan Ekonomi Islam*, Dialetika, 2013.

Mhd, Syahman Sitompul, *Akuntansi Masjid*, Medan : Febi UIN.SU Press, 2015,
H. 8

Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, Medan : Madenatera, 2016, H. 15

Nasrul Qadarrochman, “*Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dipenorogo, Semarang, 2010.

N.N, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 Ayat 1&7.

N.N Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Pasal 1 Ayat 3,4,5.

N.N, Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 1 Ayat 2.

Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.

Puji Retno Wulandari, “*Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Studi Kasus Di Perumahan Pt. Pertamina Unit Pelayanan Lii Plaju-Sumatera Selatan)*”, Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan, Vol.2, No.3, September 2014.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, Jakarta: RAJAWALI PERS, 2008.

Rani Ulhusna, “*Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*”, JOM FEKOM, Vol. 4, No. 1 (Februari 2017)

Rr. Lulus Prapati NSS, Edy Suryawardana, Dan Dian Triyani, “*Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*”

Shofwan Hanif Dan Dian Pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFEST, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: ALVABETA CV, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, Bandung: ALVABETA, 2018.

Sulistijo Sidarto Ulyo, M.T Dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Kontruksi*, Depok: PRANADAMEDIA GRUP, 2018.

Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Malang: POLINEMA PRESS, 2018.

Suwardjoko P. Warpani Dan Indira P. Warpai, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, Bandung : ITB.

Syamsuri, “*Paradigma Pembangunan Ekonomi, Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, *Islamiconomic* : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 7 No. 2 (Juli-Desember, 2006).

Todara, M Dan Smith, S, *Pengembangan Ekonomi Edisi 9*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Disbudpar kabupaten lampung barat 2018

Media lampung .co.id